

**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,
DANA ALOKASI KHUSUS DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TERHADAP
BELANJA MODAL PADA KABUPATEN DAN
KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2021**

NASKAH PUBLIKASI



Diajukan Untuk Memenuhi
Syarat-syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tunas Pembangunan
Surakarta

Umbu Ardian Tri Putra
NIM : C0219027

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TUNAS PEMBANGUNAN
SURAKARTA
2022**



UNIVERSITAS TUNAS PEMBANGUNAN SURAKARTA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

LEMBAR PERSETUJUAN NASKAH PUBLIKASI

(PERNYATAAN PEER REVIEWER)

Judul : Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2021

Nama : Uumbu Ardian Tri Putra

NIM : C0219027

Naskah Publikasi ini telah memenuhi syarat sebagai Artikel Ilmiah dan dapat diajukan dalam Jurnal Ilmiah, berdasarkan atas hasil karya ilmiah/penelitian yang telah Peneliti selesaikan

Surakarta, 18 Januari 2023

Pembimbing II

(Istinganah/Eni Maryanti, S.Si., SE., M.Si)
NIDN. 0608087404

Pembimbing I

(Supartini, SE., M.Si)
NIDN. 0607106701



UNIVERSITAS TUNAS PEMBANGUNAN SURAKARTA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH PUBLIKASI

Judul : Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2021

Nama : Uumbu Ardian Tri Putra

NIM : C0219027

Naskah publikasi ini telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal: Selasa, 24 Januari 2023

Ketua Penguji : Syahriar Abdullah, SE, M.Si

Sekretaris : Rahmatya Widyaswati, SE, M.M

Anggota : Supartini, SE, M.Si

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Program Studi Akuntansi

(Dra. Sri Wijastuti, MM)
NIDN. 0608106401

(Syahriar Abdullah, SE, M.Si .)
NIDN. 0630088502

HALAMAN PERNYATAAN

UNIVERSITAS TUNAS PEMBANGUNAN SURAKARTA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

PERNYATAAN PENULISAN

Judul : Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2021

Nama : Umbu Ardian Tri Putra

NIM : C02109027

1. Saya menyatakan dan bertanggung jawab dengan sebenarnya bahwa penelitian ini adalah hasil karya saya sendiri. Jika pada suatu saat ada pihak yang mengklaim bahwa penelitian ini sebagai karyanya yang disertai dengan bukti yang cukup, maka saya bersedia membatalkan gelar saya beserta hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.
2. Saya menyatakan bahwa hasil penelitian ini diperbolehkan untuk disebarluaskan dan dipublikasikan secara umum oleh Universitas Tunas Pembangunan Surakarta bersama dengan dosen pembimbing.

Surakarta, 18 Januari 2023



Umbu Ardian Tri Putra

**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,
DANA ALOKASI KHUSUS DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN
TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN DAN
KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2021**

Umbu Ardian Tri Putra, Supartini, Istinganah Eni Maryanti
Program Studi Akuntansi, Universitas Tunas Pembangunan Surakarta
Jl. Walanda Maramis No. 31 Surakarta
e-mail: umbuardian@gmail.com

Abstract: Indonesia is still facing various challenges such as the relatively high level of poverty, unemployment and inequality between regions in Indonesia. The high level of fiscal stress is influenced by several factors, namely: Regional Original Income (PAD), Regional Expenditure, Economic Growth (PDRB), General Allocation Fund (DAU), Fiscal Decentralization, and Regional Income Diversification. Based on the description of the background above, the authors are interested in conducting research on the Effect of Regional Original Income, General Allocation Funds, Special Allocation Funds and Remaining Budget Financing on Capital Expenditures in Regencies and Cities in Central Java Province in 2018-2021.

This research was conducted at the Director General of Fiscal Balance of the Regional Government of Central Java Province by collecting data on APBD realization reports for all Regencies and Cities in Central Java Province during the 2018-2021 period. In this study the data collection method used was the documentation method to obtain data regarding PAD, Regional Tax and Capital Expenditure data in the APBD Realization report from the Director General of Regional Government Fiscal Balance website (www.djpk.depkeu.go.id). Data analysis was performed using multiple linear regression methods.

Based on data analysis, the conclusion in this study is that Regional Original Income (PAD) has a positive effect on Capital Expenditures in Regencies and Cities in Central Java Province in 2018-2021. The General Allocation Fund has a positive effect on Capital Expenditures in Regencies and Cities in Central Java Province in 2018-2021. The Special Allocation Fund has a positive effect on Capital Expenditures in Regencies and Cities in Central Java Province in 2018-2021. The excess budget financing (SiLPA) has a positive effect on capital expenditure in regencies and cities in Central Java province in 2018-2021. The coefficient of determination (R^2) is 31.2%. This shows that capital expenditure is influenced by the variables PAD, DAU, DAK, and SiLPA, while the remaining 68.8% is influenced by other variables not included in this study.

Keywords: Capital Expenditure, PAD, DAU, DAK, and SiLPA

Abstrak: Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti masih relatif tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan antar daerah di Indonesia. Tingginya tingkat fiscal stress dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Daerah, Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Dana Alokasi Umum (DAU), Desentralisasi Fiskal, dan Diversifikasi Pendapatan Daerah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2021.

Penelitian ini dilakukan di situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah dengan mengambil data laporan realisasi APBD pada seluruh Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2018-2021. Pada penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi untuk memperoleh data mengenai data PAD, Pajak Daerah dan Belanja Modal dalam laporan Realisasi APBD dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah (www.djpk.depkeu.go.id). Analisis data dilakukan menggunakan metode regresi linier berganda.

Berdasarkan analisis data, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2021. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2021. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2021. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2021. Koefisien Determinasi (R^2) sebesar 31,2 %. Hal ini menunjukkan bahwa belanja modal dipengaruhi oleh variabel PAD, DAU, DAK, dan SiLPA, sedangkan sisanya sebesar 68,8 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Kata kunci: Belanja Modal, PAD, DAU, DAK, dan SiLPA

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah merupakan suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan (Icih, 2021). Pelimpahan kewenangan tersebut diikuti dengan penyerahan sumber-sumber pendanaan yang tadinya dikelola pemerintah pusat menjadi dikelola oleh pemerintah daerah berupa penyerahan perpajakan maupun bantuan dana transfer (Supriyanto, 2020). Sampai saat ini di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti masih relatif tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan antar daerah di Indonesia. Tingginya tingkat fiscal stress dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Daerah, Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Dana Alokasi Umum (DAU), Desentralisasi Fiskal, dan Diversifikasi Pendapatan Daerah.

Belanja Modal merupakan komponen belanja langsung dalam anggaran pemerintah yang menghasilkan *output* berupa aset tetap. Belanja Modal sangat berhubungan dengan perencanaan keuangan jangka panjang, terutama pembiayaan untuk pemeliharaan aset tetap yang dihasilkan dari Belanja Modal tersebut. Menurut konsep *Multi-Term Expenditure Framework* (MTEF), kebijakan Belanja Modal harus memperhatikan kemanfaatan (*usefulness*) dan kemampuan keuangan pemerintah daerah (*budget capability*) dalam pengalokasian aset tersebut dalam jangka panjang (Richard, 2017)

Selama ini belanja daerah lebih digunakan untuk belanja rutin yang relative kurang produktif. Richard (2017) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan. Pemerintah daerah dapat terselenggara dengan baik karena adanya dukungan dari faktor-faktor sumber daya yang mampu menggerakkan jalannya roda organisasi pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan. Salah satu faktornya adalah keuangan. Faktor keuangan merupakan faktor utama yang menjadi sumber finansial bagi penyelenggaraan roda pemerintah daerah. Keuangan daerah merupakan keseluruhan tatanan, perangkat, kelembagaan, dan kebijakan penganggaran yang meliputi pendapatan dan belanja daerah. Pendapatan daerah dapat bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun lalu, Pendapatan Asli Daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak, sumbangan dan bantuan serta penerimaan pembangunan.

Penelitian yang dilakukan Valda Meliantha Afifta (2020) tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Studi Empiris Pada Provinsi Di Indonesia Tahun 2020 Semester 1) menunjukkan bahwa secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Secara parsial, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. , sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Amelia Sestu Rahajeng (2021) tentang Pengaruh

Pajak Daerah, DAU, DAK Terhadap Belanja Modal Provinsi Jawa Timur (Periode 2008-2019) menunjukkan hasil variabel pajak daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Untuk variabel DAU dan DAK secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan secara simultan Pajak Daerah, DAU dan DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Timur. Penelitian yang dilakukan oleh Indra Sulistyarningsih (2019) tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap Alokasi Belanja Modal. Hal ini menunjukkan bahwa setiap Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan maka jumlah pengalokasian anggaran Belanja Modal juga akan meningkat begitu juga sebaliknya, Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap alokasi Belanja Modal. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Dana Alokasi Umum yang diterima daerah maka Belanja Modal yang dialokasikan oleh pemerintah daerah akan semakin meningkat begitu juga sebaliknya, Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap alokasi Belanja Modal. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa kenaikan Dana Alokasi Umum yang diterima akan meningkatkan juga alokasi Belanja Modal begitu juga sebaliknya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2021”**.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2021?
2. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2021?
3. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2021?
4. Apakah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) berpengaruh terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2021?
5. Apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2021?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun peneliti, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2021.

2. Mengetahui Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2021.
3. Mengetahui Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2021.
4. Mengetahui Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2021.
5. Mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran secara bersama-sama terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2021.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Landasan Teori / Tinjauan Pustaka

a. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Halim: 2017). Belanja Modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja Modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan Belanja Modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender.

Berdasarkan PSAP Nomor 2, Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam Belanja Modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Kemudian pada pasal 53 ayat 4 menyebutkan bahwa Kepala Daerah menetapkan batas minimal kapitalisasi sebagai dasar pembebanan Belanja Modal selain memenuhi batas minimal juga pengeluaran anggaran untuk belanja barang tersebut harus memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi bersifat tidak rutin. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal adalah pengeluaran yang berasal dari suatu anggaran pada pemerintah yang digunakan untuk memperoleh aset tetap atau aset lainnya yang dapat memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

b. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Mardiasmo (2018) Pendapatan Asli Daerah

adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dari dua pendapat mengenai pengertian Pendapatan Asli Daerah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah yang berasal dari daerah itu sendiri dimana dana yang diperoleh dikelola oleh pemerintah daerah dan jajarannya dan telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

c. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (Nordriawan, 2017).

Menurut Damas Dwi Anggoro (2017) Dana Alokasi Umum (DAU) adalah pendapatan yang diperoleh dari alokasi APBN untuk pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah guna mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah. Alokasi DAU merupakan pelaksanaan asas desentralisasi dalam otonomi daerah. Sedangkan menurut Rachim (2016) Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa Dana Alokasi Umum adalah dana transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk pemerataan keuangan antar daerah dalam rangka desentralisasi.

d. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No.33 Tahun 2004, wilayah yang menerima DAK harus menyediakan dana penyesuaian paling tidak 10% dari DAK yang ditransfer ke wilayah, dan dana penyesuaian ini harus dianggarkan dalam anggaran daerah (APBD). Meskipun demikian daerah dengan pengeluaran yang lebih besar dari penerimaan tidak perlu menyediakan dana penyesuaian. Tetapi perlu diketahui bahwa tidak semua daerah menerima DAK karena DAK bertujuan untuk pemerataan dan untuk meningkatkan kondisi infrastruktur fisik yang dinilai sebagai prioritas nasional.

e. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Abdul Hafidz Tanjung (2017) menyatakan bahwa, “SiLPA adalah selisih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah selama satu periode pelaporan”. Sedangkan menurut Mursyidi (2017), SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan (pendapatan daerah) dan pengeluaran (belanja daerah) selama satu periode anggaran. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) merupakan selisih lebih realisasi penerimaan

dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA mempresentasikan sisa 23 kas yang timbul karena realisasi pendapatan daerah yang melebihi realisasi belanja daerah. Ada tidaknya SiLPA dan besar kecilnya sangat tergantung pada tingkat belanja yang dilakukan pemerintah daerah.

Jika pada tahun anggaran tertentu realisasi belanja daerah lebih rendah dari anggaran atau terjadi efisiensi anggaran, maka akan dimungkinkan diperoleh SiLPA yang lebih tinggi. Tetapi sebaliknya jika belanja daerah tinggi, maka SiLPA yang diperoleh kecil. Bahkan jika belanja daerah lebih besar daripada pendapatan daerah maka akan menyebabkan defisit fiskal, dan tidak ada SiLPA untuk tahun anggaran bersangkutan tetapi justru dimungkinkan terjadi sisa kurang pembiayaan anggaran (SIKPA). Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 137 yaitu merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk a) menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, b) mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung, dan c) mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa SiLPA merupakan salah satu sumber pembiayaan defisit selain dana cadangan, penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pinjaman daerah apabila APBD diperkirakan defisit.

2. Kerangka Berpikir

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Belanja Modal sangat penting sehingga perlu didukung oleh beberapa faktor tersebut.

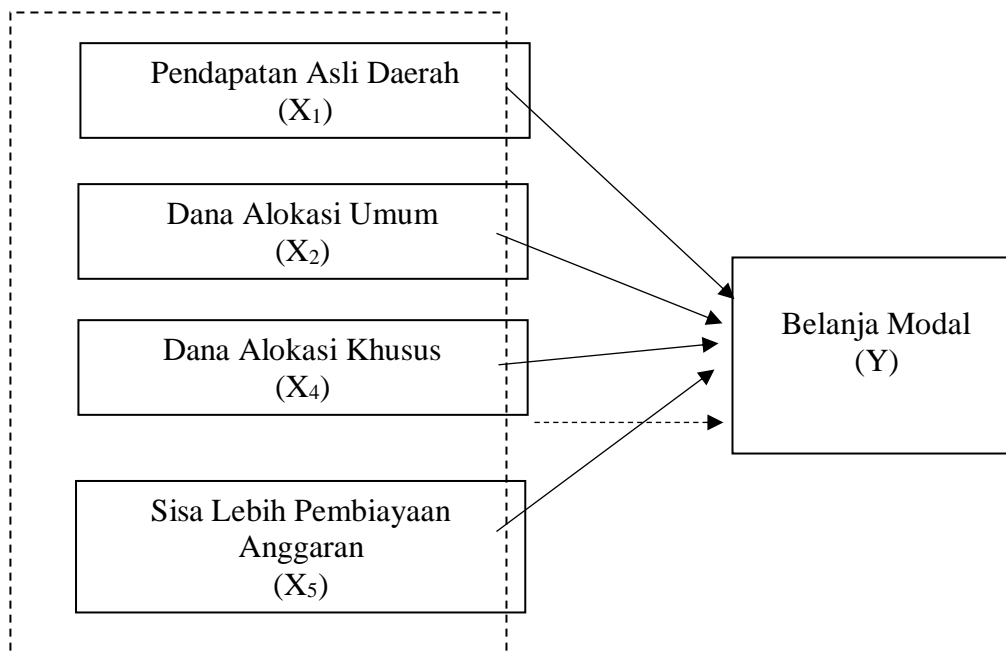
Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah. Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pengeluaran pemerintah daerah akan disesuaikan dengan penerimaan daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum pendapatan pengeluaran.

Faktor lain yang mempengaruhi Belanja Modal adalah Dana Alokasi Umum. Dana Alokasi Umum merupakan salah satu dana perimbangan yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan pemerintah daerah dapat menggunakan dana ini untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Dana Alokasi Umum juga merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk Belanja Modal guna pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka pemberian pelayanan publik yang baik. Dengan adanya transfer Dana Alokasi Umum dari pemerintah pusat maka pemerintah daerah bisa mengalokasikannya untuk membiayai Belanja Modal.

Dana perimbangan lain yang menjadi faktor yang mempengaruhi Belanja Modal adalah Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus ini merupakan salah satu sumber pendanaan untuk Belanja Modal. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara Belanja Modal dengan pemberian dana transfer dari pemerintah pusat dengan alokasi anggaran pengeluaran daerah melalui Dana Alokasi Khusus.

Berdasarkan Permendagri No 13 tahun 2006. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah suatu sisa dana yang perolehannya berasal dari aktualisasi pengeluaran dan penerimaan anggaran suatu daerah dalam satu periode. Sedangkan menurut PP No. 58 tahun 2005 SiLPA adalah sisa lebih dari pengeluaran dan penerimaan anggaran selama satu periode. Menurut (Ardhini & handayani, 2011) mengemukakan bahwa SiLPA berdampak positif pada belanja modal. Selaras dengan pendapat (Kusnandar & Siswanto, 2012) yang mengutarakan bahwa terdajadit korelasi yang signifikan dan positif antara SiLPA dengan belanja modal.

Berdasarkan pendapat-pendapat dan pengertian dari masing-masing variabel bebas yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh bersama-sama terhadap variabel terikatnya yaitu Belanja Modal. Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka dapat digambarkan hubungan variabel independen dan variabel dependen sebagai berikut:



Gambar 1 Paradigma Penelitian

Keterangan:

- > = Pengaruh Variabel X terhadap variabel Y secara individual
 - . - . -> = Pengaruh Variabel X terhadap variabel Y secara simultan

C. METODOLOGI PENELITIAN

1. Desain Penelitian

Desain penelitian ini adalah penelitian kausal komparatif, yaitu berusaha menguraikan peristiwa yang telah terjadi dengan menelisik kebelakang untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan peristiwa tersebut terjadi. Penelitian kausal komparatif adalah penelitian yang berusaha mengamati alasan atau penyebab terjadinya sebuah fenomena yang diteliti (Kuncoro, 2019). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian yang dimana data yang diperoleh diwujudkan dalam bentuk angka-angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasil penelitian ini diwujudkan dalam angka.

2. Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah dengan mengambil data laporan realisasi APBD pada seluruh Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2018-2021. Data penelitian diunduh dari situs resmi Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah www.djpk.depkeu.go.id . Adapun waktu penelitian dimulai dari bulan Oktober hingga Desember 2022.

3. Populasi Dan Sampel

Populasi merupakan kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain yang menjadi objek perhatian atau kumpulan seluruh objek yang menjadi perhatian (Purwanto:2018). Populasi dalam penelitian ini adalah data Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah Kota Surakarta.

Sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai karakteristik dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi. Pada penelitian ini sampel diambil dengan metode sampling jenuh. Menurut Sugiyono (2020) Sampling Jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Penelitian ini mengambil data pada tahun 2021.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Metode ini digunakan untuk memperoleh data Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2021. Data tersebut diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah (www.djpk.depkeu.go.id).

5. Teknik Analisis Data

Setelah melakukan uji asumsi klasik, yang meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji multikolonieritas, maka selanjutnya data dianalisa dengan menggunakan metode regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Analisis digunakan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran secara bersama-sama terhadap Belanja Modal.

D. ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Pada penelitian ini terdapat lima data yaitu tentang Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran. Data tersebut terlampir dalam lampiran 1. Untuk mendeskripsikan dan menguji pengaruh antara variabel bebas dan terikat, maka pada bagian ini akan menyajikan deskripsi data yang telah diperoleh. Deskripsi data yang akan disajikan meliputi nilai minimal, maksimal, mean dan standar deviasi.

Dari hasil pengumpulan data sekunder mengenai Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2021, maka nilai minimum, maksimum, *mean*, dan standar deviasi dari variabel penelitian

Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Rangkuman Data Khusus (Dalam ribuan)

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BM	112	66386,00	800181,00	201559,2411	108115,56122
PAD	112	60611,00	1138367,00	172867,6161	153523,59279
DAU	112	262653,00	1291122,00	762873,9107	226873,48804
DAK	112	14993,00	823874,00	70865,4911	75066,99975
SilPA	112	11787,00	75628,30	5683136,00	62832,9454
Valid N (listwise)	112				

Sumber: data sekunder yang diolah.

- a. Belanja Modal
Melalui hasil dari tahap pemrosesan pengolahan data (data terlampir pada lampiran 1) dengan bantuan program IBM SPSS *Statistics Version 20*. Jumlah populasi yang diteliti yaitu sejumlah 112. Variabel Belanja Modal mempunyai nilai minimalnya sebesar Rp. 66.386.000,00 diperoleh dari Kabupaten Purbalingga pada tahun 2018 dan nilai maksimum sebesar Rp. 800.181.000,00 diperoleh dari Kota Semarang pada tahun 2020. Nilai *mean* Rp.201.559.241,10 dan nilai standar deviasi 108.115.561,20.
- b. Pendapatan Asli Daerah
Melalui hasil dari tahap pemrosesan pengolahan data (data terlampir pada lampiran 1) dengan bantuan program IBM SPSS *Statistics Version 20*. Jumlah populasi yang diteliti yaitu sejumlah 112. Variabel Pendapatan Asli Daerah mempunyai nilai minimal sebesar Rp. 60.611.000,00 diperoleh dari Kota Salatiga tahun 2018, dan nilai maksimalnya sebesar Rp. 1.138.367.000,00 diperoleh dari Kota Semarang tahun 2021. Nilai *mean* 172.867.616,10 dan nilai standar deviasi 153.523.592,80.
- c. Dana Alokasi Umum
Melalui hasil dari tahap pemrosesan pengolahan data (data terlampir pada lampiran 1) dengan bantuan program IBM SPSS *Statistics Version 20*. Jumlah populasi yang diteliti yaitu sejumlah 112. Variabel Dana Alokasi Umum mempunyai nilai minimal sebesar Rp. 262.653.000,00 diperoleh dari Kota

Salatiga tahun 2018, dan nilai maksimalnya sebesar Rp. 1.291.122.000,00 diperoleh dari Kota Surakarta tahun 2021. Nilai *mean* 762.873.910,70 dan nilai standar deviasi 226.873.488,00.

d. Dana Alokasi Khusus

Melalui hasil dari tahap pemrosesan pengolahan data (data terlampir pada lampiran 1) dengan bantuan program IBM SPSS *Statistics Version 20*. Jumlah populasi yang diteliti yaitu sejumlah 112. Variabel Dana Alokasi Khusus mempunyai nilai minimal sebesar 14.993.000,00 diperoleh dari Kota Semarang tahun 2016, dan nilai maksimalnya sebesar Rp. 823.874.000,00 diperoleh dari kota Surakarta tahun 2019. Nilai *mean* 70.865.491,10 dan nilai standar deviasi sebesar 75.066.999,75.

e. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Melalui hasil dari tahap pemrosesan pengolahan data (data terlampir pada lampiran 1) dengan bantuan program IBM SPSS *Statistics Version 20*. Jumlah populasi yang diteliti yaitu sejumlah 112. Variabel Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran mempunyai nilai minimal sebesar 11.787.000,00 diperoleh dari Kabupaten Kendal tahun 2016, dan nilai maksimalnya sebesar Rp. 75.628.000,00 diperoleh dari Kabupaten Grobogan tahun 2019. Nilai *mean* 56.831.136,00 dan nilai standar deviasi sebesar 65.832.945,40.

2. Uji Hipotesis

a. Uji t

Penelitian ini menggunakan teknik Analisis Regresi Berganda untuk menguji pengaruh antara variabel PAD, DAU, DAK, dan SilPA terhadap Belanja Modal pada Kota dan Kabupaten Provinsi Jawa Tengah. Analisa regresi dalam penelitian ini menggunakan persamaan sebagai berikut. Melalui bantuan program IBM SPSS *Statistics Version 20* diperoleh rangkuman hasil analisis regresi linier sederhana seperti pada tabel berikut:

Tabel 1 Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	106197.036	9630.584		11.027	.000
PAD	.552	.042	.783	13.217	.000
DAU	.314	.034	.658	9.168	.000
DAK	.240	.028	.166	6.770	.032
SilPA	.423	.243	.321	5.423	.017

a. Dependent Variable: BM

Berdasarkan tabel 8 dapat dibuat persamaan regresi pertama sebagai berikut:

$$Y_1 = 0,552 X_1 + 0,314 X_2 + 0,240 X_3 + 0,423 X_4 + e$$

Ket :

Y_1 = Belanja Modal

X_1 = Pendapatan Asli Daerah

X_2 = Dana Alokasi Umum

X_3 = Dana Alokasi Khusus

X_4 = Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

1. Koefisien regresi sebesar 0,552, menunjukkan bahwa apabila Pendapatan Asli Daerah meningkat sebesar 1 persen maka Belanja Modal akan meningkat sebesar 0,552persen dengan asumsi variabel bebas yang lain konstan.

Pendapatan Asli Daerah (X_1) mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Modal (Y), ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi (r_{x_1y}) sebesar 0,783.

Nilai signifikansi sebesar 0,000, nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan 0,05 dan nilai $t_{hitung} 13,217 > t_{tabel} 1,98137$ menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (X_1) signifikan terhadap Belanja Modal (Y). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal adalah positif. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka Belanja Modal akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya apabila semakin rendah Pendapatan Asli Daerah maka Belanja Modal akan semakin rendah. Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana tersebut, maka hipotesis pertama yang menyatakan “Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2021” dapat diterima.

2. Koefisien regresi Dana Alokasi Umum sebesar 0,314, menunjukkan bahwa apabila Dana Alokasi Umum meningkat sebesar 1 persen maka Belanja Modal akan meningkat sebesar 0,314 persen dengan asumsi variabel bebas yang lain konstan. Dana Alokasi Umum (X_2) mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Modal (Y), ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi (r_{x_2y}) sebesar 0,658. Nilai signifikansi sebesar 0,000, nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan 0,05 dan nilai $t_{hitung} 9,168 > t_{tabel} 1,98137$ menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (X_2) signifikan terhadap Belanja Modal (Y).

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal adalah positif dan signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Dana Alokasi Umum maka Belanja Modal akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya apabila semakin rendah Dana Alokasi Umum maka Belanja Modal akan semakin rendah.

Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana tersebut, maka hipotesis kedua yang menyatakan “Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2021” dapat diterima.

3. Koefisien regresi Dana Alokasi Khusus sebesar 0,240, menunjukkan bahwa apabila Dana Alokasi Khusus meningkat sebesar 1 persen maka Belanja Modal akan meningkat sebesar 0,240 persen dengan asumsi variabel bebas yang lain konstan. Dana Alokasi Khusus (X_3) mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Modal (Y), ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi (r_{x_3y}) sebesar 0,166. Nilai signifikansi sebesar 0,000, nilai ini lebih tinggi dibandingkan dengan 0,05 dan nilai $t_{hitung} 6,770 > t_{tabel} 1,98137$ menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (X_3) signifikan terhadap Belanja Modal (Y).

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal adalah positif. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Dana Alokasi Khusus maka Belanja Modal akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya apabila semakin rendah Dana Alokasi Khusus maka Belanja Modal akan semakin rendah.

Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana tersebut, maka hipotesis ketiga yang menyatakan “Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2021” dapat diterima.

4. Koefisien regresi SiLPA sebesar 0,4230, menunjukkan bahwa apabila SiLPA meningkat sebesar 1 persen maka Belanja Modal akan meningkat sebesar 0,423 persen dengan asumsi variabel bebas yang lain konstan. SiLPA (X_4) mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Modal (Y), ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi (r_{x_4y}) sebesar 0,243. Nilai signifikansi sebesar 0,017, nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan 0,05 dan nilai t_{hitung} 5,423 > t_{tabel} 1,98137 menunjukkan bahwa SiLPA (X_4) signifikan terhadap Belanja Modal (Y).

Pengaruh SiLPA terhadap Belanja Modal adalah positif dan signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi SiLPA maka Belanja Modal akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya apabila semakin rendah SiLPA maka Belanja Modal akan semakin rendah.

Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana tersebut, maka hipotesis keempat yang menyatakan “Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2021” dapat diterima.

b. Uji F

Melalui bantuan program IBM SPSS Statistics Version 20 diperoleh rangkuman hasil analisis uji F seperti pada tabel berikut:

Tabel 2 Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	968964293837.340	3	322988097945.780	106.184	.000 ^a
Residual	328511884323.151	108	3041776706.696		
Total	1297476178160.491	111			

a. Predictors: (Constant), SiLPA, DAK, DAU, PAD

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: data sekunder yang diolah.

Dari hasil perhitungan regresi linier berganda pada tabel 9 di atas, dapat diketahui hubungan antar variabel independen dan variabel dependen yang dapat dirumuskan dalam rumus sebagai berikut:

Hasil pengujian statistik dengan uji F diterangkan melalui F_{tabel} sebesar 2,69 dan F_{hitung} sebesar 106,184, (pada signifikansi $0,000 \leq 0,05$) maka $F_{hitung} > F_{tabel}$ artinya secara bersama-sama seluruh variabel independen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dengan demikian model regresi ini menjelaskan bahwa “Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal”. Oleh karena itu, disimpulkan hipotesis kelima diterima.

c. Koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) dari hasil regresi linier berganda menunjukkan seberapa besar variabel dependen (Belanja Modal) dipengaruhi oleh variabel independen (PAD, DAU, DAK, SiLPA). Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada nilai *Adjusted R Square* dalam tabel berikut :

Tabel 3 Hasil Analisa Koefisien determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.619 ^a	.383	.312	3.975	.919

a. Predictors: (Constant), Upah, Kepuasan, Motivasi

b. Dependent Variable: Prestasi

Berdasarkan data di atas, diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,312 atau (31,2%), sehingga dapat dijelaskan bahwa Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2021 di pengaruhi oleh variabel PAD, DAU, DAK, dan SiLPA sebesar 31,2% sedangkan sisanya sebesar 68,8% di pengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

3. Pembahasan

a. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan pada analisis data yang telah dilakukan, hipotesis pertama menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2021”, terbukti Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hal ini ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi (r_{xy}) sebesar 0,783. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka Belanja Modal akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya jika semakin rendah Pendapatan Asli Daerah maka Belanja Modal akan semakin rendah. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Saptaningsih Sumarmi (2019) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang harus terus dipacu pertumbuhannya. Menurut Mardiasmo (2019:132) Pendapatan Asli daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baik dan diikuti dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah sehingga akan meningkatkan Belanja Modal pada daerah tersebut. Berdasarkan hasil penelitian diatas, yaitu semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dan pemanfaatan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang benar membuat besaran dana yang disalurkan pemerintah daerah untuk melakukan Belanja Modal dapat menjadi besar. Dengan demikian hipotesis pertama diterima.

b. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Berdasarkan pada analisis data yang telah dilakukan, hipotesis kedua menyatakan bahwa “Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2021”, terbukti yaitu Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hal ini ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi (r_{x_2y}) sebesar 0,658. Nilai signifikansi sebesar 0,000, nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan 0,05. Nilai $t_{hitung} 9,168 > t_{tabel} 1,98137$. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Dana Alokasi Umum maka Belanja Modal akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya jika semakin rendah Dana Alokasi Umum maka Belanja Modal akan semakin rendah. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Sugiardi & Supadmi (2014) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Menurut Kesit Bambang Prakosa (2014) Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan. Hal ini berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Transfer ini cukup signifikan sehingga pemerintah daerah dapat menggunakannya untuk member pelayanan publik yang lebih baik. Dana Alokasi Umum (DAU) dapat dikategorikan sebagai transfer tak bersyarat atau *block grant* yang merupakan jenis transfer antar tingkat pemerintah yang tidak dikaitkan dengan program pengeluaran tertentu. Tujuan dari penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) ini adalah untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar pada masyarakat. Berdasarkan dari hasil penelitian diatas yaitu semakin besar Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh pemerintah daerah maka dapat menyebabkan semakin besar pula kegiatan Belanja Modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu hipotesis kedua diterima.

c. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Berdasarkan pada analisis data yang telah dilakukan, hipotesis ketiga menyatakan bahwa “Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2021”, terbukti yaitu Dana Alokasi Khusus mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hal ini ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi (r_{x_3y}) sebesar 0,166. Nilai signifikansi sebesar 0,000, nilai ini lebih tinggi dibandingkan dengan 0,05. Nilai $t_{hitung} 1,770 < t_{tabel} 1,98137$ maka Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal adalah positif. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Dana Alokasi Khusus maka Belanja Modal akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya jika semakin rendah Dana Alokasi Khusus maka Belanja Modal akan semakin rendah. Hasil ini menjelaskan bahwa kabupaten dan kota yang mendapatkan Dana Alokasi Khusus yang besar cenderung memiliki Belanja Modal yang besar pula. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Isti Permatasari (2016) yang menyatakan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang di alokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk

membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus di arahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. Dengan adanya pengalokasian Dana Alokasi Khusus diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran Belanja Modal karena Dana Alokasi Khusus cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik. Berdasarkan hasil penelitian di atas yaitu semakin besar Dana Alokasi Khusus maka dapat menyebabkan semakin besar pula kegiatan Belanja Modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian hipotesis ketiga diterima.

d. Pengaruh SiLPA terhadap Belanja Modal

Berdasarkan pada analisis data yang telah dilakukan, hipotesis ketiga menyatakan bahwa “Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2021”, terbukti yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Modal. Koefisien regresi sebesar 0,4230, menunjukkan bahwa apabila SiLPA meningkat sebesar 1 persen maka Belanja Modal akan meningkat sebesar 0,423 persen dengan asumsi variabel bebas yang lain konstan. SiLPA (X_4) mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Modal (Y), ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi (r_{x_4y}) sebesar 0,243. Nilai signifikansi sebesar 0,017, nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan 0,05 dan nilai $t_{hitung} 5,423 > t_{tabel} 1,98137$ menunjukkan bahwa SiLPA (X_4) signifikan terhadap Belanja Modal (Y).

SiLPA dapat digunakan untuk pertimbangan dalam melakukan alokasi belanja langsung maupun belanja modal sehingga pembangunan daerah yang belum terealisasi pada tahun sebelumnya ataupun yang telah direncanakan pada tahun yang bersangkutan dapat dilaksanakan. Sehingga penggunaan SiLPA pada suatu daerah yang dialokasikan melalui belanja modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembangunan manusia di daerah tersebut. Penelitian SiLPA dalam hubungannya dengan belanja modal telah di teliti oleh Ardhini (2019) dengan objek penelitian di kabupaten/kota wilayah Jawa Tengah dengan hasil bahwa SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa SiLPA merupakan salah satu sumber pendanaan belanja modal. Penelitian Kartikasari (2014) tentang pengelolaan PAD dan SiLPA dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik menunjukkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau dikenal dengan SiLPA berpengaruh terhadap tingkat kinerja pelayanan publik. SiLPA tahun anggaran sebelumnya bisa dijadikan pertimbangan dalam melakukan alokasi belanja langsung maupun belanja modal untuk pembangunan daerah.

e. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran secara bersama-sama terhadap Belanja Modal

Hasil pengujian statistik dengan uji F diterangkan melalui F_{tabel} sebesar 2,69 dan F_{hitung} sebesar 106,184, (pada signifikansi $0,000 \leq 0,05$) maka $F_{hitung} > F_{tabel}$ artinya secara bersama-sama seluruh variabel independen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi

Khusus (DAK) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Dengan demikian model regresi ini menjelaskan bahwa “Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal”.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Saptaningsih Sumarmi (2019) yang menyatakan bahwa secara simultan variabel PAD, DAU, DAK dan SiLPA berpengaruh secara signifikan terhadap variabel alokasi Belanja Modal. Hipotesis kelima yang menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2021” diterima.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2021.
2. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2021.
3. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2021.
4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2021.
5. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2021.
6. Koefisien Determinasi (R^2) sebesar 31,2 %. Hal ini menunjukkan bahwa belanja modal dipengaruhi oleh variabel PAD, DAU, DAK, dan SiLPA, sedangkan sisanya sebesar 68,8 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

2. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan serta keterbatasan penelitian di atas, maka peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah daerah diharapkan dapat terus menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah agar bermanfaat dalam pendanaan untuk meningkatkan mutu dari pelayanan publik di daerah. Pemerintah daerah juga diharapkan mampu mengelola dan memanfaatkan sepenuhnya Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi khusus dengan baik untuk meningkatkan mutu pelayanan publik.

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah cakupan daerah kabupaten dan kota khususnya selain di Provinsi Jawa Tengah supaya hasil dari penelitian yang dilakukan lebih representatif.
3. Variabel yang digunakan dalam penelitian yang akan datang diharapkan lebih lengkap dan bervariasi dengan menambah variabel independen lain.

3. Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti hanya mengambil 4 variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.
2. Periode yang diambil penelitian ini terbatas, sehingga penelitian ini dilakukan dalam periode empat tahun yaitu tahun 2018-2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hafidz Tanjung. 2017. *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua*. Bandung: Alfabeta.
- Aprizay. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi, Pascasarjana Universitas SyiahKuala*. ISSN 2302-0164 pp 140-149 volume 3.
- Ardhini dan Sri Handayani. 2011. Pengaruh Rasio Keuangan Daerah terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik dalam Perspektif Teori Keagenan (Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah). *Jurnal Akuntansi, Pascasarjana*.
- Bayu Samoedra. 2016. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Alokasi Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010- 2014. *Thesis*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Bhuono Agung. 2018. Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Anggoro, Damas Dwi. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Darwanto dan Yulia Yustikasari. 2017. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar, Unhas.
- Ghozali, Imam. 2019. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim,. 2017. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Iciah, Asep Kurniawan, Rijal Fadillah. 2021. The Influence Of Local Revenue, Capital Expenditure, Economic Growth Of Gdp, General Allocation Funds, Fiscal Decentralization And Diversification Of Regional Income On Fiscal Stress. *Journal of Accounting for Sustainable Society (JASS)* Volume 03 Nomor 02 Tahun 2021 (Hal : 34-53)

- Ida Farida dan Andi Muhammad Sadli. 2021. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016-2020. *Thesis*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Indra Sulistyaningsih. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah. *Diponegoro Journal Of Accounting*, Vol. 8, No. 2, Nov. 2019. [Online]. Retrieved From :
- Isti Permatasari. 2016. Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* : Volume 5, Nomor 1, Januari 2016
- Kesit Bambang Prakosa. 2014. Analisa Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Propinsi Jawa Tengah dan DIY. *JAAI*. Vol. 8 No. 2, 101-118.
- Kuncoro, Mudrajad. 2019. *Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Erlangga: Jakarta.
- Kusnandar dan Siswanto Dodik. 2012. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Martini, Kadek dan Dwirandra. 2015. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah pada Alokasi Belanja Modal di Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi*. Bali: Universitas Udayana.
- Masayu Rahma Wati dan Catur Martian Fajar. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. *Jurnal Kajian Akuntansi*, Vol 1, (1), 2017, 63-76
- Mursyidi. 2017. *Akuntansi Pemerintah di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama
- Nordiawan. 2017. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Purwanto. 2018. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011). Universitas Negeri Yogyakarta.
- Rachim. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Asdaf Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat Program Studi Keuangan Publik
- Richard. 2017. Analisis Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talud. Vol. 8 No. 2 (2017): *Goodwill* Vol. 8 No. 2 Juli-Desember 2017
- Saptaningsih Sumarmi. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi D.I.Yogyakarta. *Akmenipa UPY*, Vol 4.

- Sugiardi & Supadmi. 2014. Pengaruh PAD, DAU, dan SILPA Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *E-jurnal*. Universitas Udayana Bali.
- Sunyoto. 2017. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Syaiful. 2019. *Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
- Valda Meliantha Afifta. 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Studi Empiris Pada Provinsi Di Indonesia Tahun 2020 Semester 1). *e-Proceeding of Management* : Vol.9, No.2 April 2022